

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP SLACK DENGAN TEKANAN SOSIAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

by Saring Suhendro

Submission date: 21-Feb-2022 07:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 1766970965

File name: book_chapter.pdf (723.37K)

Word count: 7443

Character count: 49372



JILID 2

Isu Kontemporer
Akuntansi Publik

Dr. Harnovinsah, SE., Ak., M. Si., CA., Cert. IPSAS., CMA., CSRS
Dr. Ana Sopanah, SE., Ak., M. Si., CA., CMA
Dr. Rida Perwita Sari, SE., Ak., M. Aks., CA, CPA

 **SCOPINDO**
MEDIA PUSTAKA

**BUNGA RAMPAI AKUNTANSI PUBLIK :
ISU KONTEMPORER AKUNTANSI PUBLIK**

Author:

Ana Sopanah, Irfan Fatoni, Marita Ossy Danawanti, Dwi Ekasari Harmadji, Emiliana Mulia, Endah Puspitosarie, Yeni Priatna Sari, Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz, Irkham Huda, Achdiar Redy Setiawan, Almira Keumala Ulfah, Biana Adha Inapty, Alfiana Antoh, Mahfud Sholihin, Verawaty, Nina Yudisia Mariati, M. Ibrahim Fikri, Yulie Fitria Setianti, Harnovinsah, Indayani, Syarifah Rahmah, Sisca Medianti, Titik Setyaningsih, Ferry Hendro Basuki, Rifdah Anafiah Zuhroh, Rida Perwita Sari, Baihaqi, Heribertus Andre Purwanugraha, Brigitta Patricia Stefany Dolle, Abdul Halim, Saring Suhendro, Agus Bayu Santoso, Abdul Halim, Johan Arifin,

Layouter:

Dewi

5

Editor:

Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., Cert. IPSAS., CSRS., CMA

Dr. Ana Sopanah, SE., M.Si., Ak., CA., CMA

Dr. Rida Perwita Sari, SE., M.Aks., Ak., CA., CPA

Design Cover :

Azizur Rachman

copyright © 2020

Penerbit



Scopindo Media Pustaka
Jl. Kebonsari Tengah No. 03, Surabaya
Telp. (031) 82519566
scopindomedia@gmail.com

ISBN : 978-623-6500-55-2

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

21

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

HALAMAN JUDUL	i
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I :	Analisis Korupsi “Bersama-Sama” Di Pemerintah Kota Malang (Ana Sopanah, Irfan Fatoni dan Marita Ossy Danawanti)1
BAB II :	Makna Akuntabilitas Masjid Jami’ Aminah Mukri Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo (Dwi Ekasari Harmadji).....23
BAB III :	Pengembangan Wisata Cafe Sawah Pujon Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) (Emiliana Mulia, Ana Sopanah, Endah Puspitosarie)41
BAB IV :	Pengaruh Karakteristik Keuangan Daerah Dan Transparansi Publik Terhadap Frekuensi Fraud Pada Pemerintah Daerah (Yeni Priatna Sari)53
BAB V :	Pengembangan Aplikasi Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Berbasis Android (Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz, Irkham Huda)75
BAB VI :	Reformasi Paradigmatik Birokrasi Desa: Langkah Mendasar Mengurai Titik Kritis Pengelolaan (Keuangan) Desa (Achdiar Redy Setiawan)93
BAB VII :	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (Almira Keumala Ulfah)107
BAB VIII :	Penerapan Dan Permasalahan-Permasalahan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa (Biana Adha Inapty).....121
BAB IX :	Apakah Faktor-Faktor Demografi Mempengaruhi Niat Melakukan Whistleblowing? Studi Pada Staf Akuntansi Pemerintah Daerah Di Papua (Alfiana Antoh, Mahfud Sholihin).....163

BAB X	:	Analisis Kinerja Finansial Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Verawaty, Nina Yudisia Mariati, M. Ibrahim Fikri).....	179
BAB XI	:	Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Ditinjau Dari Segi Asas <i>Good Governance</i> (Yulie Fitria Setianti).....	199
BAB XII	:	Isu-Isu Lokal Tatakelola Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa: Perspektif <i>Stakeholder</i> Desa (Indayani, Syarifah Rahmah)	215
BAB XIII	:	Konsep Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah (Sisca Medianti)	233
BAB XIV	:	Campaign Yayasan Kita Bisa: Sudahkah Mencapai Best Value? (Titik Setyaningsih)	245
BAB XV	:	Kajian Efektivitas Pengurusan Bumo (Badan Usaha Milik Ohoi) Di Kabupaten Maluku Tenggara (Ferry Hendro Basuki).....	257
BAB XVI	:	Peran <i>Intellectual Capital Disclosure</i> pada Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Rifdah Anafiah Zuhroh, Rida Perwita Sari)	277
BAB XVII	:	Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Baihaqi).....	291
BAB XVIII	:	Prinsip Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Paroki (Studi Etnografi Inkulturatif Pada Gereja Katolik Lokal di Larantuka) (Heribertus Andre Purwanugraha, Brigitta Patricia Stefany Dolle).307	307
BAB XIX	:	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Slack Dengan Tekanan Sosial Sebagai Variabel Moderasi (Abdul Halim, Saring Suhendro).....	319
BAB XX	:	Relaksasi Penerimaan Pajak Pph Badan Pasal 25/29 di Masa Pandemi & Dan Kaitannya Dengan UU Omnibus Law Di Bidang Perpajakan (Agus Bayu Santoso)	339
BAB XXI	:	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja: Sebuah Model Konseptual Riset (Johan Arifin)	351



BAB 19

*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran
Terhadap Slack dengan Tekanan Sosial
Sebagai Variabel Moderasi*

(ABDUL HALIM, SARING SUHENDRO)

BAB XIX
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP
SLACK DENGAN TEKANAN SOSIAL SEBAGAI VARIABEL
MODERASI

Abdul Halim¹, Saring Suhendro²

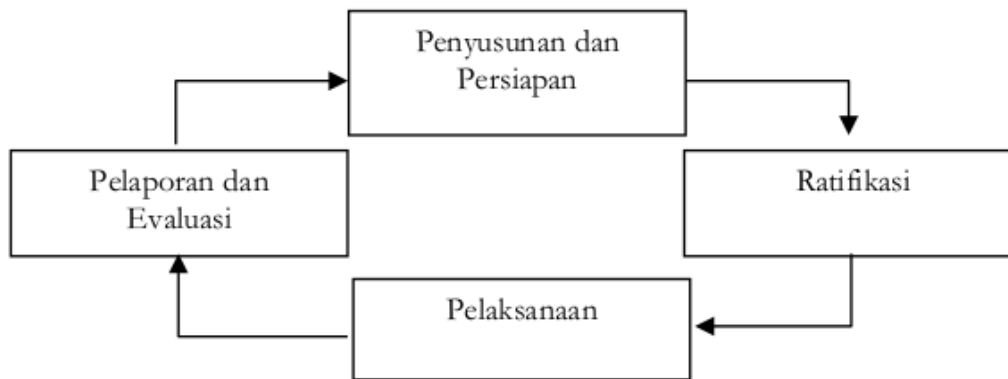
1. Universitas Gadjah Mada
2. Universitas Lampung

PENDAHULUAN

Penganggaran daerah sering menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat, karena anggaran daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan suatu daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan instrumen kebijakan atas pengelolaan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dengan dana publik (Mardiasmo, 2002). Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Jones & Pendlebury, 1996).

Menurut Mardiasmo (2002) proses dan siklus anggaran daerah terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan dan persiapan, ratifikasi, implementasi, serta pelaporan dan evaluasi. Kegiatan atau program aksi daerah terlebih dahulu harus direncanakan dan disiapkan, kemudian disahkan untuk diimplementasikan kemudian diakuntansikan, dan dilaporkan dan dievaluasi. Penganggaran merupakan aktivitas terus menerus dari mulai penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Proses ini dikenal dengan siklus anggaran (*budgeting cycle*). Siklus ini tidak berjalan secara estafet, tetapi mengalami proses simultan (gambar 1).

Pada tahap penyusunan dan persiapan anggaran daerah yang dilakukan ketika alokasi sumber dana untuk program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau sekarang dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Aparat SKPD mengestimasi pendapatan dan mengalokasikan belanja. Pada tahap ini, kemungkinan munculnya *slack* positif yang disengaja oleh aparat daerah masih terlalu tinggi (Mardiasmo, 2001).



Gambar 1. Siklus Anggaran Daerah

Pada tahap penyusunan dan persiapan anggaran, estimasi untuk pendapatan dan pengeluaran jarang akurat yang disebabkan karena adanya asimetri informasi (Otley, 1985). Asimetri informasi ini muncul ketika bawahan memiliki informasi yang lebih baik dari atasan. Ketidakseimbangan informasi ini dapat digunakan salah satu pihak untuk mengambil keuntungan dan disinilah muncul *dysfunctional behavior* dari para manajer. Pada proses penyusunan anggaran munculnya dorongan dari manajer-manajer yang dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran akan menyatakan pendapatan *underestimate* dan pengeluaran *overestimate*.

Ketentuan bahwa jumlah rencana pendapatan yang dimuat dalam anggaran daerah merupakan batas terendah yang harus dicapai, dan jumlah rencana pengeluaran merupakan batas tertinggi, cenderung memunculkan *slack* positif yang disengaja (*intended positive budgetary slack*). Bisa terjadi bahwa target penerimaan yang dinyatakan dalam anggaran daerah bukan merupakan target yang sesuai potensinya tetapi target yang jauh lebih rendah dari potensinya. Dalam situasi ini, akan tersedia cadangan dana dari penerimaan daerah yang dapat digunakan tanpa harus mempertanggungjawabkannya. Di sisi pengeluaran, jumlah pengeluaran dapat di *mark-up* agar batas pengeluaran maksimal dapat ditingkatkan. Hal ini akan ada kelebihan dana yang dapat dialokasikan pada beberapa pos pengeluaran yang bersifat *miscellaneous* (Mardiasmo, 2001).

Fenomena *slack* merupakan konsekuensi dari anggaran daerah yang disusun oleh manajer sebagai bentuk partisipasi penyusunan anggaran (Merchant, 1985; Young, 1985; Nouri *et al.*, 1996; dan Indriantoro, 2000). Pada era reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah, proses penganggaran di pemerintah daerah mengedepankan adanya aspek partisipasi dalam penyusunannya. Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penganggaran daerah mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Pejabat yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengusulan anggaran daerah adalah para manajer level menengah dan bawah.

Reformasi anggaran yang meliputi perubahan proses penyusunan APBD (*budget process reform*) diharapkan dapat menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar

mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara 20 nomis, efisien, dan efektif dengan mendengarkan suara masyarakat. Reformasi memberikan kesempatan lebih besar kepada elemen masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan/kontrol anggaran daerah terhadap eksekutif dalam proses penyusunan anggaran. Sarana dan mekanismenya adalah melalui *public budget hearing* dalam rangka untuk memonitor dan mengkoreksi rancangan APBD yang diajukan oleh eksekutif. Stede (2000) mempertegas bahwa *slack* dapat dikurangi dengan menerapkan sistem pengawasan anggaran yang ketat.

Salah satu upaya untuk meminimalkan asimetri informasi adalah melalui sistem kontrol. Fozaard (2001) menyatakan bahwa usaha untuk mengurangi asimetri informasi pada organisasi pemerintah adalah adanya sistem kontrol eksternal terhadap eksekutif melalui pengawasan dan monitoring. Sistem kontrol eksternal melalui tekanan sosial terhadap eksekutif yang efektif akan mampu mengurangi *slack* pada saat penyusunan anggaran. 1

Young (1985) menyatakan bahwa tekanan sosial merupakan perasaan yang dirasakan oleh bawahan yang mampu mencegah bawahan dari salah penyajian dirinya sendiri ketika atasan memiliki informasi atas produktivitas bawahan (asimetri informasi). Tekanan sosial yang merupakan bagian dari pengawasan pada saat proses penyusunan anggaran dilakukan secara formal maupun non formal (Yuhertiana, 2004). Pengawasan secara formal dilakukan oleh legislatif sedangkan pengawasan secara informal oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan publikasi media. Peran legislatif sebagai wakil rakyat akan mewakili aspirasi rakyat yang diwakilinya. Legislatif sebagai wakil rakyat berperan sebagai prinsipal akan melakukan kontrol terhadap anggaran. Peran LSM sebagai lembaga yang berorientasi sosial dan politik senantiasa mengkritisi secara tajam proses-proses penentuan kebijakan dan anggaran yang berlangsung di pemerintah daerah. Peran media sangat strategis dalam rangka pemberitaan mengenai persoalan sosial dan politik di pemerintah daerah terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pemberitaan media mampu memberikan informasi dan membentuk opini publik secara cepat.

Pengawasan dilakukan dengan cara mengevaluasi dan mengkritisi usulan anggaran pendapatan dan belanja agar lebih transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi yang mengarah pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan anggaran yang berkualitas. Peran ketiga aktor tersebut akan mempengaruhi keputusan dalam menetapkan alokasi anggaran (Mas'oed, 2003).

Banyak penelitian pada sektor publik khususnya pada entitas pemerintah daerah yang menguji pengaruh partisipasi penganggaran terhadap *slack* (Suhartono, 2006; Pahurutu, 2005; Fani, 2011; Rahmiati, 2013; Sandrya dan Wirawan, 2013). Namun, masih sedikit penelitian yang menguji upaya yang dilakukan untuk mengurangi *slack* oleh pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proses penyusunan anggaran daerah.

Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi partisipasi penyusunan anggaran yang mempengaruhi *slack* dengan tekanan sosial sebagai variabel moderasi. Selain itu, menginvestigasi tekanan sosial manakah yang mampu memberikan tekanan sosial paling besar dalam menekan *dysfunctional behavior* aparat pemerintah daerah.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi manajemen bahwa dalam proses penyusunan anggaran daerah perlu memberikan perhatian terhadap tekanan sosial dalam rangka mengurangi *slack* pada saat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah yaitu agar selalu melibatkan secara intens lembaga-lembaga formal dan non formal dalam proses penyusunan anggaran dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi azas formalitas atas pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dana publik

Bagian selanjutnya dari tulisan dari hasil penelitian ini diorganisasikan seperti berikut ini. Bagian 2 membahas mengenai tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Bagian 3 akan membahas mengenai metode penelitian. Sedangkan untuk pembahasan hasil dan kesimpulan dijelaskan pada bagian 4 dan 5.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori keagenan

Fenomena *slack* dapat dipahami dalam konteks masalah keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dalam suatu hubungan antara *principal* dan *agent*, dimana *agent* bertindak untuk kepentingan *principal*-nya, pada suatu saat jika tujuan *principal* dan *agent* tidak sejalan maka, *agent* akan cenderung untuk melakukan kehendaknya untuk mencapai tujuannya sendiri. Jika hal ini terjadi dalam proses penyusunan anggaran, maka disebut sebagai *slack* (Moore *et al.*, 2000 dalam Yuhertiana, 2004).

Dalam konteks hubungan tersebut, kedua pihak berusaha memaksimalkan kepentingan masing-masing sehingga munculnya potensi *agency problem*. *Agent* memiliki potensi besar untuk memaksimalkan kepentingannya dalam kontrak jangka pendek yang dimotivasi oleh beberapa motivasi. Salah satu motivasi *slack* adalah adanya *slack* positif yang disengaja (*intended positive budgetary slack*) (Mardiasmo, 2002). Penyebab *slack* ini karena adanya *asymmetric information* antara aparat daerah dan pihak eksternal eksekutif (Jensen dan Meckling, 1976). *Asymmetric information* ini terjadi karena aparat pemerintah daerah memiliki informasi lebih tentang kondisi institusi dibandingkan dengan para pihak eksternal.

Social Influence

Perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi aksinya dengan lingkungan sosial. Teori yang menjelaskan tentang hal ini adalah teori *social influence*. Teori ini berhubungan dengan efek interaksi sosial terhadap individu. Riset awal tentang teori *social influence* dilihat pada temuan Allport dalam Stede (2000) bahwa individu akan memberi penilaian yang lebih konservatif pada kondisi dimana ada keberadaan orang lain daripada dalam keadaan terisolasi.

Young (1985) menyatakan bahwa tekanan sosial merupakan perasaan yang dirasakan oleh bawahan pada saat penyusunan anggaran agar tidak salah penyajian ketika atasan memiliki informasi atas produktivitas bawahan. Mengacu pada definisi tersebut, maka tekanan sosial yang dirasakan oleh manajer di pemerintah daerah pada saat penyusunan anggaran tidak menyembunyikan kapasitas produktifnya ketika ada pengaruh dari pihak lain yaitu elemen masyarakat sebagai sosial kontrol. Tekanan

sosial merupakan bagian dari suatu sistem kontrol. Stede (2000) mempertegas bahwa *slack* dapat dikurangi dengan menerapkan sistem kontrol anggaran yang ketat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap *Slack*

Penelitian mengenai *slack* biasanya dikaitkan dengan akibat partisipasi penyusunan anggaran yang memungkinkan seorang manajer cenderung melakukan *slack* (Blanchette, 2002). Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan *slack* memiliki hubungan positif dan signifikan (Lukha, 1988; Young, 1985; dan Pahurutu (2005). Tingkat partisipasi yang tinggi dari para manajer dalam proses penyusunan anggaran akan memberikan kesempatan dalam menciptakan *slack* secara langsung.

Young (1985) mengemukakan bahwa bawahan tidak melaporkan informasi kepada atasan untuk membantu proses penyusunan anggaran. Atasan memberi wewenang kepada bawahan dengan harapan agar bawahan melakukan usaha yang terbaik bagi organisasi. Namun, sering keinginan atasan tidak sama dengan bawahan sehingga menimbulkan konflik diantara mereka. Bawahan cenderung memberikan informasi yang bias agar anggaran mudah dicapai dan dapat memberikan *reward* berdasarkan pencapaian anggaran, sehingga hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan *slack* menjadi positif, yaitu semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran akan semakin tinggi pula keinginan bawahan untuk melakukan *slack*. Dengan melakukan *slack* diharapkan sasaran dapat mudah dicapai dan risiko kegagalan mencapai sasaran dapat diperkecil. Agar sasaran anggaran dapat mudah dicapai maka bawahan cenderung akan melakukan *slack*.

Di pemerintah daerah kemungkinan munculnya *slack* positif yang disengaja masih terlalu tinggi (Mardiasmo, 2001). Ketentuan bahwa jumlah rencana penerimaan yang dimuat dalam anggaran daerah merupakan batas terendah yang harus dicapai, dan jumlah rencana pengeluaran yang dimuat dalam anggaran daerah merupakan batas tertinggi, cenderung memunculkan *slack* yang positif yang disengaja (*intended positive budgetary slack*). Bisa terjadi bahwa target penerimaan yang dinyatakan dalam anggaran daerah bukan merupakan target yang sesuai potensi riilnya (apa adanya) tetapi target yang jauh lebih rendah dari potensinya. Di sisi pengeluaran hal yang sama juga dapat terjadi. Berdasarkan ketentuan di atas dan karena tidak adanya standar analisa belanja, maka jumlah pengeluaran dapat di *mark-up* agar batas pengeluaran maks dapat ditingkatkan.

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran membuat manajer bawahan akan berperilaku disfungsional. Dengan dasar bahwa anggaran digunakan sebagai dasar penilaian kinerja mereka, maka bawahan cenderung menganggarkan lebih pada saat menyusun anggaran belanja dan menganggarkan kurang pada saat menyusun anggaran pendapatan. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran pada penyusunan anggaran pemerintah daerah.

Peran Moderasi Tekanan Sosial terhadap Hubungan antara Partisipasi Penganggaran dan *Slack*

Masalah yang muncul dalam proses penganggaran adalah bagaimana agar bawahan menyajikan secara jujur informasi privatnya terutama ketika informasi ²⁰ ebut digunakan dalam mengevaluasi kinerja bawahan. Apabila kinerja bawahan dinilai berdasarkan tingkat pencapaian anggaran, maka bawahan cenderung untuk menyembunyikan informasi privatnya. Bawahan yang memiliki informasi privat tentang kapasitas produktifnya, maka mereka memiliki kemungkinan untuk menyajikan informasi yang tidak akurat mengenai kapasitas produktifnya (asimetri informasi).

Manajer-manajer berpartisipasi dalam proses penganggaran dengan mengkomunikasikan informasi berkenaan dengan lingkungan lokal kepada *superior*. Jadi, manajer-manajer dapat memfokuskan pada aktivitas keseluruhan dalam unitnya tanpa berkonsentrasi pada bagaimana keputusannya mempengaruhi unit lain atau organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, pada proses partisipasi penyusunan anggaran bawahan mungkin menyajikan tidak tepat informasi-informasi privatnya yang dapat menyebabkan anggaran menjadi *slack* (Merchant, 1985; dan Young, 1985). Karena itu, ketika partisipasi bawahan yang memungkinkan atasan mengakses ke informasi privat, asimetri informasi memungkinkan *slack* ditingkatkan dengan partisipasinya dalam penyusunan anggaran.

Partisipasi dalam proses peny¹¹nan dan pengusulan anggaran daerah, aparat pemerintah daerah akan merasa adanya pengaruh orang lain/pihak lain yang disebutnya sebagai tekanan sosial. Secara lebih spesifik, manajer-manajer unit pertanggungjawaban dipengaruhi oleh interaksinya dengan lingkungan luar. Stede (2000) menemukan bahwa tek¹³n sosial dapat mengurangi jumlah *slack* pada anggaran bawahan. Keinginan manajer untuk memperbesar *slack* dapat dikurangi deng¹ menerapkan sistem kontrol anggaran yang ketat.

Tekanan sosial merupakan perasaan yang dirasakan oleh bawahan yang mampu mencegah bawahan dari salah penyajian dirinya sendiri ketika atasan memiliki informasi atas produktivitas bawahan. Jika tekanan sosial yang dirasakan oleh bawahan dalam proses perencanaan anggaran tinggi, maka *slack* yang terjadi akan kecil. Demikian juga sebaliknya, jika tekanan sosial yang dirasakan oleh bawahan dalam proses perencanaan¹⁹ anggaran rendah, maka *slack* yang terjadi akan besar.

Young (1985) mengemukakan ¹ bahwa dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan *slack* ada variabel pemoderasi yang turut mempengaruhi hubungan kedua variabel yaitu tekanan sosial. Variabel tekanan sosial secara potensial mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan *slack*. Young (1985) mengemukakan bahwa hubungan partisipasi dalam penyusunan anggaran dengan *slack* akan berpengaruh negatif dengan tingkat tekanan sosial yang tingg¹⁹ akan berpengaruh positif apabila tingkat tekanan sosial rendah.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diungkapkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran akan lebih efektif apabila manajer menyajikan informasi mengenai kapasitas produktifnya secara akurat dengan adanya tekanan sosial yang tinggi. Dengan kata lain, tingginya *slack* yang dipengaruhi oleh partisipasi penyusunan anggaran yang efektif, disebabkan karena adanya tekanan sosial yang tinggi. Tetapi

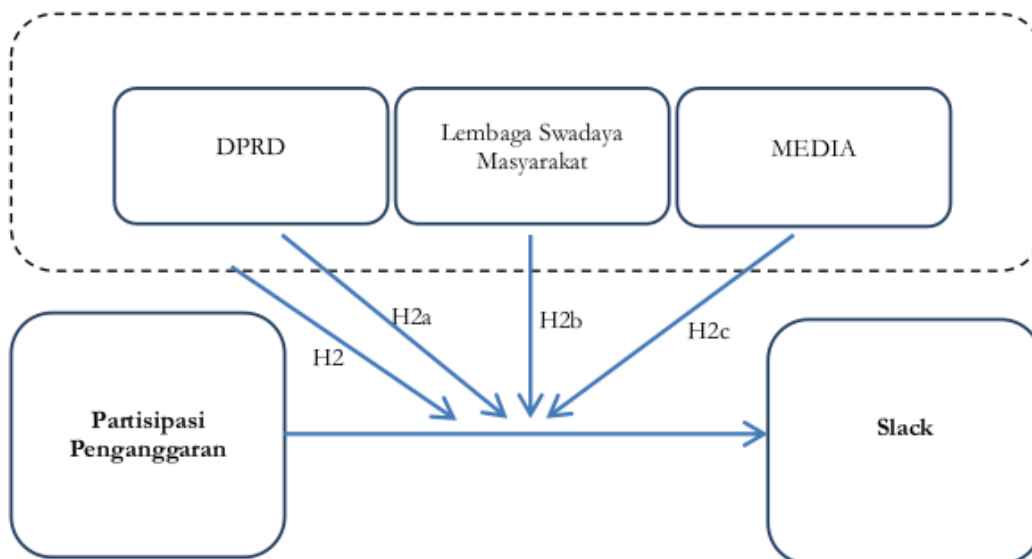
partisipasi penyusunan anggaran ini tidak akan efektif apabila manajer dengan tekanan sosial yang rendah sehingga *slack* yang dicapai akan tinggi pula. ²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan *slack* dapat diperbaiki dengan mempertimbangkan peranan variabel pemoderasi. Tekanan sosial mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan *slack*. Untuk mengetahui apakah tekanan sosial berperan sebagai variabel pemoderasi, dapat dilihat pada partisipasi penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajer yang menyembunyikan informasi privatnya (asimetri informasi tinggi dan rendah). Pada kelompok manajer dengan tekanan sosial tinggi akan terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan *slack*. Sebaliknya partisipasi penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajer dengan tekanan sosial rendah akan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan *slack*. Pernyataan ini dinyatakan dalam bentuk hipotesa sebagai berikut:

H²: Tekanan sosial mengurangi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap *slack*

Tekanan sosial dalam proses penganggaran daerah berasal dari proses pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh DPRD dan pengawasan eksternal oleh LSM dan Media Masa. Ketiga aktor yang terlibat dalam proses pengawasan penyusunan anggaran pemerintah daerah, berperan dalam mengurangi dampak partisipasi penyusunan anggaran terhadap *slack*. Oleh karena itu, peran ketiga aktor tersebut dirumuskan dalam hipotesis berikut ini.

- H^{2a} Tekanan sosial dari DPRD mengurangi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap *slack* ²⁰
- H^{2b} Tekanan sosial dari LSM mengurangi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap *slack* ²⁰
- H^{2c} Tekanan sosial dari Media Masa mengurangi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap *slack* ²⁰



METODE PENELITIAN

Pemilihan Sampel

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metoda survey. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Pertimbangan pertama adalah *convenience sample* yaitu sampel nonprobabiliti yang elemen-elemen sampel didasarkan kepada kemudahan aksesibilitas dalam memperoleh 15 a. Pemerintah daerah yang memiliki kemudahan akses bagi peneliti adalah Pemerintah Kota Pekalongan-Jawa Tengah, Pemerintah Barito Timur-Kalimantan 15 Tengah, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Way Kanan-Lampung, Pemerintah Kabupaten Mesuji-Lampung, Pemerintah Lampung Timur-Lampung, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemerintah Provinsi Bali.

Pertimbangan kedua adalah responden penelitian ini merupakan aparat pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran daerah (kepala dinas/badan, kepala bagian anggaran, kepala subbagian anggaran, kepala bidang anggaran, dan kasi anggaran) pada pemerintah daerah di Indonesia.

Teknis pengumpulan data dilakukan dengan cara mengirimkan kuisisioner kepada Pemerintah Daerah. Jumlah kuisisioner yang dikirimkan untuk masing-masing pemerintah daerah adalah sebanyak 40 kuisisioner, sehingga total kuisisioner yang dikirimkan adalah 300 kuisisioner.

Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran pemerintah daerah, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap 4 target anggaran.

Untuk mengukur partisipasi penyusunan anggaran menggunakan 6 (enam) instrumen penelitian yang dikembangkan oleh Milani (1975). Item-item pertanyaan tentang partisipasi penyusunan anggaran meliputi: (1) seberapa besar keterlibatan Bapak/Ibu dalam pengusulan dan penyusunan anggaran bidang yang menjadi tanggungjawab Bapak/Ibu, (2) apakah atasan Bapak/Ibu membicarakan alasan yang logis jika merevisi anggaran yang Bapak/Ibu susun atau usulkan, (3) seberapa sering Bapak/Ibu mengajak atasan mendiskusikan anggaran yang Bapak/Ibu usulkan, (4) seberapa besar pengaruh yang Bapak/Ibu miliki dalam penentuan jumlah anggaran final bidang yang menjadi tanggungjawab Bapak/Ibu, (5) seberapa besar Bapak/Ibu merasa mempunyai kontribusi penting terhadap anggaran yang menjadi tanggungjawab Bapak/Ibu, dan (6) seberapa sering atasan Bapak/Ibu meminta pendapat atau usulan Bapak/Ibu selama penyusunan anggaran yang menjadi tanggungjawab Bapak/Ibu. Format respon atas instrumen tersebut melalui 7 (tujuh) point skala likert dari sangat tidak setuju (1) sampai sangat setuju (7). Koefisien *cronbach alpha* untuk instrumen penelitian ini adalah 0,84 (Nouri dan Parker, 1998).

Tekanan sosial merupakan persepsi yang dirasakan eksekutif atas adanya tekanan dari pihak luar. Tekanan yang dirasakan oleh pihak eksekutif berasal dari tekanan legislatif, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau publikasi media yang

mampu mempengaruhi keputusan dalam menetapkan alokasi anggaran. Variabel ini diukur secara kualitatif untuk mengetahui persepsi tentang adanya tekanan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Yuhertiana (2004). Tekanan sosial diukur atas persepsi yang dirasakan eksekutif atas tekanan dari legislatif, LSM, dan publikasi media. Item-item tersebut meliputi: (1) seberapa besar pengaruh tekanan legislatif yang anda rasakan saat menyusun anggaran, (2) seberapa besar pengaruh tekanan lembaga swadaya masyarakat yang anda rasakan saat menyusun anggaran, dan (3) seberapa besar pengaruh tekanan media masa yang anda rasakan saat menyusun anggaran. Format respon atas instrumen tersebut melalui 7 (tujuh) point skala likert dari sangat rendah (1) sampai sangat tinggi (7).

Slack adalah perbedaan antara jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi terbaik dari organisasi. Bawahan cenderung mengajukan anggaran dengan merendahkan pendapatan dan menaikkan belanja dibandingkan dengan estimasi terbaik dari yang diajukan, sehingga target akan lebih mudah tercapai. Variabel ini diukur secara kualitatif untuk mengetahui persepsi tentang kecenderungan untuk menciptakan *slack* sebagaimana yang dilakukan oleh Onsi (1973). Instrumen yang digunakan adalah 6 (enam) item pertanyaan yang dilakukan untuk mengukur kecenderungan menciptakan *slack*. Item-item tersebut terdiri dari: (1) ukuran atau standar yang ditetapkan dalam anggaran mendorong produktivitas yang tinggi dalam unit yang menjadi tanggung jawab saya, (2) anggaran di bidang yang menjadi tanggung jawab Saya dapat dicapai dengan aman, (3) saya harus secara seksama memantau belanja/pendapatan dalam bidang tanggung jawab Saya karena kendala-kendala (batasan-batasan) dalam anggaran, (4) anggaran dalam bidang yang menjadi tanggung jawab Saya tidak menuntut terlalu banyak dari Saya, (5) target-target anggaran Saya tidak menyebabkan Saya harus secara khusus memperhatikan perbaikan efisiensi dalam bidang yang menjadi tanggung jawab Saya, dan (6) target-target yang ditentukan untuk dicapai dalam anggaran saya sulit dicapai. Format respon atas instrumen tersebut melalui 7 (tujuh) point skala likert dari sangat tidak setuju (1) sampai sangat setuju (7). Koefisien *cronbach alpha* untuk instrumen penelitian ini adalah 0,88 (Dunk, 1993).

Variabel Kontrol

Umur

Umur merupakan faktor intrinsik yang diyakini mempengaruhi pencapaian target. Perbedaan umur akan berhubungan dengan kesulitan di dalam memproses stimuli yang kompleks dan mengalokasikan perhatian kepada informasi (Plude dan Hoyer dalam Jogiyanto, 2007). Dengan penambahan umur membuat pegawai yang lebih tua akan lebih terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh sosial (Morris dan Venkatesh dalam Jogiyanto, 2007). Semakin tua umur seseorang, maka mereka cenderung lebih mudah terpengaruh dengan pengaruh sosial. Umur diklasifikasikan dalam kategori nominal yaitu: 20-30 tahun =1; 31-40 tahun =2; 41-50 tahun = 3; dan >51 tahun =4.

Lama Kerja

Lama kerja merupakan variabel yang dapat menjelaskan pengalaman seseorang berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh setelah mengerjakan sesuatu hal.

Knoers dan Haditono (1999) dalam Asih (2006) menyatakan bahwa lamanya kerja pegawai akan memperoleh pengalaman yang merupakan proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Semakin lama masa kerja seseorang, maka akan semakin berpengalaman dalam menghadapi tekanan pihak manapun. Lama kerja diklasifikasikan dalam nominal, yaitu: Umur diklasifikasikan dalam kategori nominal yaitu: 0-5 tahun = 1; 6-10 tahun = 2; 11-15 tahun = 3; 16-20 tahun = 4; 21-25 tahun = 5; dan >26 tahun = 6.

Model Penelitian

Model penelitian yang dikembangkan untuk menguji hipotesis 1 dan 2 dalam penelitian ini adalah:

$$SA_i = b_0 + b_1PP_i + b_2TS_i + b_3PP_i*TS_i + b_4UM_i + b_5LK_i + e_i \dots\dots\dots(1)$$

Untuk menguji tekanan sosial mana yang lebih berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dan *slack*, model yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

$$SA_i = b_0 + b_1PP_i + b_2TS_DPRD_i + b_3PP_i*TS_DPRD_i + b_4UM_i + b_5LK_i + e_i \dots\dots(2a)$$

$$SA_i = b_0 + b_1PP_i + b_2TS_LSM_i + b_3PP_i*TS_LSM_i + b_4UM_i + b_5LK_i + e_i \dots\dots(2b)$$

$$SA_i = b_0 + b_1PP_i + b_2TS_MED_i + b_3PP_i*TS_MED_i + b_4UM_i + b_5LK_i + e_i \dots\dots(2c)$$

Dimana:

- SA = *Slack*
- PP = Partisipasi Penganggaran
- TS = Tekanan Sosial
- TS_DPRD = Tekanan Sosial dari DPRD
- TS_LSM = Tekanan Sosial dari LSM
- TS_MED = Tekanan Sosial dari Media Masa
- UM = Umur
- LK = Lama Kerja
- b₀ = Konstanta
- b₁-b₅ = Koefisien Regresi
- e = error

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Untuk mengetahui valid tidaknya item-item pertanyaan pada masing-masing variabel dilakukan pengujian dengan faktor analisis. Uji faktor analisis ini dilakukan terhadap nilai setiap variabel dengan *varimax rotation*. Sebelum dilakukan faktor analisis

masing-masing instrumen variabel diharapkan memiliki nilai *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequasi (Kaiser's MSA)* lebih besar dari 0,50. Chia (1995) menyatakan bahwa item-item yang terdapat dalam faktor analisis dan faktor *loading* lebih dari 0,40 dapat dinyatakan bahwa item pertanyaan tersebut valid.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung *cronbach alpha*. Hasil pengukuran terhadap variabel tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dapat ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Nunnally, 1978).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tingkat pengembalian kuisisioner sebagai berikut:

Tabel 1.
Tingkat Pengembalian Kuisisioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuisisioner yang dikirim kepada responden	300
2	Kuisisioner yang tidak kembali	(178)
3	Kuisisioner yang kembali tetapi pengisian tidak lengkap	(8)
4	Kuisisioner yang kembali tetapi tidak memenuhi kriteria	(6)
5	Kuisisioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk analisis akhir	108

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah kuisisioner yang dikirim sebanyak 300 kuisisioner dengan tingkat pengembalian sebesar 122 kuisisioner (40,67%), sedangkan sisanya sebanyak 59,33% tidak kembali. Jumlah kuisisioner yang kembali tersebut selanjutnya hanya 108 kuisisioner saja yang memenuhi kriteria untuk diikutkan dalam analisis akhir, sedangkan sisanya sebanyak 8 kuisisioner (2,67%) tidak dapat diolah karena kuisisioner tidak diisi dengan lengkap oleh responden dan 6 kuisisioner tidak memenuhi kriteria sehingga jumlah kuisisioner total yang digunakan dalam analisis akhir adalah 108 kuisisioner atau 36%.

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas untuk mengetahui seberapa baik instrumen mampu mengukur konsep yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan analisis faktor untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan terklasifikasikan pada variabel yang telah ditentukan (*construct validity*). Suatu variabel dikatakan valid apabila memiliki faktor *loading* lebih besar dari 0,4 dan *eigenvalue* lebih besar dari 1 (Hair *et al.*, 1998).

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran yang terdiri dari 6 item pertanyaan berada pada kelompok 1, dan semua item pertanyaan dengan faktor *loading* di atas 0,4. Variabel tekanan sosial dari DPRD yang terdiri dari 1 item pertanyaan berada pada kelompok 3 dengan faktor *loading* semua item berada di atas 0,4. Variabel tekanan sosial dari LSM yang terdiri dari 1 item pertanyaan berada

pada kelompok 3 dengan faktor *loading* semua item berada diatas 0,4. Variabel tekanan 4 sial dari MEDIA yang terdiri dari 1 item pertanyaan berada pada kelompok 3 dengan faktor *loading* semua item berada diatas 0,4. Sedangkan variabel *slack* yang terdiri dari 6 item pertanyaan berada pada kelompok 2, tetapi terdapat 2 item pertanyaan dengan faktor *loading* dibawah 0,4 yaitu item SA1 dan SA2, sehingga terpaksa dikeluarkan dari instrumen.

Tabel 2.
Analisis Faktor

Rotated Component Matrix(a)

	Component				
	1	2	3	4	5
PP1	,680				
PP2	,632				
PP3	,602				
PP4	,708				
PP5	,670				
PP6	,750				
TS_DPRD			,709		
TS_LSM					,887
TS_MED				,836	
SA1					
SA2					
SA3		,912			
SA4		,906			
SA5		,667			
SA6		,697			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a Rotation converged in 5 iterations.

Setelah dilakukan penghilangan dua butir pertanyaan yaitu SA1 dan SA2, maka seluruh komponen yang tersisa memiliki faktor *loading* lebih besar dari 0,4 dan *eigenvalue* lebih dari 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah valid.

Tabel 3.
Hasil Pengujian Validitas

No	Variabel	<i>Eigenvalue</i>	<i>Loading Factor</i>
1	<i>Slack</i>	2,627	0,723 – 0,869
2	Partisipasi penyusunan anggaran	3,171	0,539 – 0,752
3	Tekanan Sosial_DPRD	1,834	0,709 – 0,709
4	Tekanan Sosial_LSM	1,157	0,836-0,836
5	Tekanan Sosial_MEDIA	1,891	0,887-0,887

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat diandalkan atau jika diulangi pengukurannya akan menghasilkan data yang tidak berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan menghitung *Cronbach's alpha*. Instrumen penelitian penelitian ini reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* > 0,60. Berikut ini adalah rangkuman hasil pengujian reliabilitas penelitian ini.

Uji reliabilitas terhadap *slack* mempunyai nilai *cronbach alpha* sebesar untuk senjangan, partisipasi penyusunan anggaran, tekanan sosial dari DPRD, tekanan sosial dari LSM, dan tekanan sosial dari Media masing-masing sebesar 0,699, 0,680, 0,739, 0,720, dan 0,712 berturut-turut. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen ini layak digunakan karena mempunyai nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 (tabel 4)

Tabel 4.
Hasil Pengujian Reliabilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
1	<i>Slack</i>	0,699
2	Partisipasi penyusunan anggaran	0,680
3	Tekanan Sosial_DPRD	0,739
4	Tekanan Sosial_LSM	0,720
5	Tekanan Sosial_MEDIA	0,712

Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika probabilitas *Asymp Sig (2-tailed) standardized residual* model regresi diatas 0,05, maka dikatakan asumsi normalitas terpenuhi. Ouput hasil pengujian normalitas terlihat bahwa *Asymp.Sig (2-tailed)* bernilai lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa asumsi normal terpenuhi.

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat korelasi antar variabel independen. Apabila nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau *variance inflation factor (VIF)* kurang dari 10 dapat dikatakan model regresi tidak terjadi multikolinearitas (Hair *et al.*, 1998). Masing-masing variabel sebelum dan setelah memasukkan variabel pemoderasi, VIF kurang dari 10 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson dengan panduan $du < DW < 4-du$ berarti tidak ada autokorelasi (Gujarati, 2013). Hasil pengujian menunjukkan nilai DW berada diantara du dan $4-du$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala autokorelasi.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Gletjser (Gujarati, 2013) dengan nilai residual absolut diregresi dengan variabel independen. Apabila pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara statistis signifikan maka terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel dependen secara statistis tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Statistik Deskriptif

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Data diambil dari menggunakan metode survey. Tabel 1 melaporkan ringkasan statistik deskriptif mean, median, max, min, dan standar deviasi dari keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 5.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
Partisipasi Penyusunan anggaran	108	14	42	32,833	32,553	5,415
Tekanan sosial	108	6	21	11,296	10,322	3,319
Tekanan sosial_DPRD	108	2	7	4,065	3	1,794
Tekanan sosial_LSM	108	2	7	3,583	3	1,541
Tekanan sosial_MEDIA	108	1	7	2,982	2,5	1,311
<i>Slack</i>	108	4	28	13,861	12,442	5,285
Umur	108	21-25	> 46	4,444	4,000	0,658
Lama Bekerja	108	0-5	> 26	3,204	3,000	1,096
Valid N (listwise)	108					

SA mengukur persepsi tentang kecenderungan untuk menciptakan *slack*. PP mengukur seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah. TS mengukur persepsi yang dirasakan eksekutif atas adanya tinggi/rendahnya tekanan dari pihak luar. TS_DPRD merupakan persepsi yang dirasakan eksekutif adanya tinggi/rendahnya tekanan dari DPRD. TS_LSM merupakan persepsi yang dirasakan eksekutif adanya tinggi/rendahnya tekanan dari

LSM. TS_MED merupakan persepsi yang dirasakan eksekutif adanya tinggi/rendahnya tekanan dari MEDIA MASA. UM dihitung merupakan umur dengan kategori nominal 20-30 tahun =1; 31-40 tahun =2; 41-50 tahun = 3; dan >51 tahun =4. Lama Bekerja kategori nominal yaitu: 0-5 tahun =1; 6-10 tahun = 2; 11-15 tahun = 3; 16-20 tahun = 4; 21-25 tahun = 5; dan >26 tahun = 6.

Tabel 6
Pearson Correlation Matrix

	PP	SA	TS1	TS2	TS3	UM	LK
PP							
SA	0,196 (0,042)	*					
TS1	-0,239 (0,013)	*	0,129 (0,183)				
TS2	0,027 (0,778)	0,064 (0,511)	0,432 (0,000)	**			
TS3	0,022 (0,822)	0,118 (0,223)	0,501 (0,000)	**	0,264 (0,006)		
UM	0,168 (0,822)	0,057 (0,559)	-0,061 (0,528)	-0,078 (0,420)	0,124 (0,202)		
LK	0,176 (0,069)	-0,007 (0,939)	-0,002 (0,987)	-0,077 (0,431)	-0,033 (0,733)	0,612 **	0,000

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 6 melaporkan matriks korelasi pearson (ρ) antara PP, SA, TS1, TS2, dan variabel kontrol. Korelasi yang rendah antar variabel yang mengukur *slack* mengindikasikan bahwa ada pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap *slack*. Korelasi antara PP dan SA positif dan signifikan ($\rho=0,196$, $p\text{-value} = 0,042$) menunjukkan bahwa PP mempengaruhi senjangan anggaran secara positif.

Pengujian Hipotesis

Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap *Slack*

Pengujian hipotesis pertama (H_1) dilakukan menggunakan persamaan 1. Pengujian ini menggunakan (model 1), yaitu regresi pertama menggabungkan ketiga variabel tekanan sosial dan regresi kedua (model 2a-c) dengan memisahkan masing-masing tekanan sosial.

Tabel 7 untuk model regresi 1, menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan penganggaran (PP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *slack* (SA) yaitu koefisien regresi sebesar 0,192 dengan $p\text{-value}=0,042$. Hasil positif dan signifikan pada level 5 persen mengindikasikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran menciptakan potensi aparat daerah untuk melakukan *slack* pada saat pengusulan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pengujian pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap *slack* selanjutnya diuji dengan cara memisahkan tekanan sosial kedalam masing-masing pengaruh tekanan sosial yaitu tekanan sosial dari DPRD (2a), LSM (2b), dan Media Masa (2c).

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa PP bernilai positif dan signifikan dimana koefisien regresi untuk tekanan sosial dari DPRD sebesar 1,181 dan $p\text{-value}=0,028$, koefisien regresi tekanan dari LSM sebesar 0,943 dan $p\text{-value}=0,080$, dan koefisien regresi tekanan dari media masa sebesar 1,017 dengan $p\text{-value}=0,053$.

Tabel 7.
Pengujian hipotesis

Variabel	Expected Sign	(1)	(2a)	(2b)	(2c)
Intersep	?	7,566 (0,016) *	13,924(0,000) **	13,928(0,000) **	13,979(0,000) **
PP	+	0,192 (0,042) *	1,181 (0,028) **	0,943 (0,080) *	1,017 (0,053) *
TS	+	0,178 (0,002)			
PP*TS	-	-1,009 (0,095) *			
TS_DPRD	+		1,159 (0,029) **		
TS_LSM	+			0,359 (0,500)	
TS_MED	+				0,690 (0,217)
PP*TS_DPRD	-		-0,836 (0,061) *		
PP*TS_LSM	-			-0,618 (0,408)	
PP*TS_MED	-				-0,454 (0,505)
UM	+	0,322 (0,236)	0,568 (0,291)	0,345 (0,526)	0,323 (0,564)
LK	+	0,105 (0,813)	-0,469 (0,300)	-0,271 (0,561)	-0,327 (0,487)
R ²		0,039	0,098	0,053	0,059
Adjusted R ²		0,031	0,053	0,047	0,033
F-Statistik		4,254 **	2,208 **	1,141 *	1,279 *

SA mengukur persepsi tentang kecenderungan untuk menciptakan *slack*. PP mengukur seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah. TS mengukur persepsi yang dirasakan eksekutif atas adanya tinggi/rendahnya tekanan dari pihak luar. TS_DPRD merupakan persepsi yang dirasakan eksekutif adanya tinggi/rendahnya tekanan dari DPRD. TS_LSM merupakan persepsi yang dirasakan eksekutif adanya tinggi/rendahnya tekanan dari LSM. TS_MED merupakan persepsi yang dirasakan eksekutif adanya tinggi/rendahnya tekanan dari MEDIA MASA. UM dihitung merupakan umur dengan kategori nominal 20-30 tahun =1; 31-40 tahun =2; 41-50 tahun = 3; 51-60 tahun =4. LK merupakan Lama Bekerja dengan kategori nominal yaitu: 0-5 tahun =1; 6-10 tahun = 2; 11-15 tahun = 3; 16-20 tahun = 4; 21-25 tahun = 5; dan >26 tahun = 6. Nilai $p\text{-value}$ ditunjukkan dalam tanda kurung.

*** signifikan pada level 0,01; **signifikan pada level 0,05; dan *signifikan pada level 0,1.

Jadi hipotesis pertama (H_1) terdukung. Hal ini sejalan dengan penelitian Lukha (1988); Young (1985); Suhartono (2006); Pahurutu (2005); Fani (2011); Rahmiati (2013); Sandrya dan Wirawan (2013) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap *slack*. Dengan kata lain, semakin tinggi derajat partisipasi aparat daerah dalam proses penyusunan anggaran daerah maka semakin tinggi potensi untuk menciptakan *slack* daerah.

Pengaruh Tekanan Sosial dalam Hubungan antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan *Slack*

Pengujian hipotesis kedua (H_2) yaitu pengaruh moderasi tekanan sosial dilakukan dengan melakukan regresi untuk pengaruh secara bersama-sama tekanan sosial (model 1) dan memisahkan masing-masing tekanan sosial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel moderasi tekanan sosial terhadap *slack* (model 2a, 2b, dan 2c). Pada Tabel 7 model (1) menunjukkan bahwa koefisien regresi PP*TS sebesar -1,009 dengan $p\text{-value}=0,095$. Hasil regresi ini menunjukkan tekanan sosial mampu mengurangi pengaruh positif partisipasi penyusunan anggaran. Dengan kata lain, interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan tekanan sosial mempengaruhi *slack*. Pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap *slack* akan tinggi apabila tekanan sosial rendah. Sebaliknya, pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap *slack* akan rendah apabila tekanan sosial tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan sosial berfungsi sebagai variabel pemoderasi antara partisipasi penyusunan anggaran dan *slack*.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Yuhertiana (2004) dan Stede (2000) yang menunjukkan bahwa tekanan sosial merupakan variabel moderasi yang mampu mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan *slack*.

Pengujian selanjutnya adalah untuk melihat dari ketiga variabel tekanan sosial, tekanan sosial mana yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengurangi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap *slack*. Pengujian dilakukan dengan cara memisahkan pengaruh masing-masing tekanan sosial (DPRD, LSM, dan Media Masa). Tabel 7 model 2a, 2b, dan 2c. Pengaruh masing-masing tekanan sosial sebagai variabel moderasi dapat dilihat dari masing-masing koefisien regresi interaksi dari PP*TS_DPRD, PP*TS_LSM, dan PP*TS_MED. Hasil pengujian atas ketiga variabel tekanan sosial dari DPRD koefisien regresi sebesar -0,836 dan $p\text{-value}=0,061$. Sedangkan koefisien regresi untuk tekanan sosial dari LSM dan Media Masa menunjukkan hasil negatif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel moderasi hanya tekanan sosial dari DPRD yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan *slack* daerah.

Tekanan sosial dari LSM dan Media Masa juga dirasakan oleh para aparat penyusunan anggaran daerah, namun intensitas dan dampaknya tidak sekuat tekanan sosial dari DPRD. Tekanan sosial dari DPRD yang merupakan proses pengawasan dan merupakan bagian formal dari proses penyusunan anggaran daerah lebih efektif dalam menekan potensi terjadinya *slack*. Sedangkan keterlibatan komponen masya-

rakat melalui LSM dan Media Masa dalam pengawasan proses penyusunan anggaran daerah belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam menekan *slack* pendapatan dan belanja daerah.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi partisipasi penyusunan anggaran yang mempengaruhi *slack* dengan tekanan sosial sebagai variabel moderasi serta menginvestigasi tekanan sosial manakah yang mampu memberikan tekanan sosial paling besar dalam menekan *dysfunctional behavior* aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap *slack*. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka kecenderungan menciptakan *slack* semakin tinggi juga.

Interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan tekanan sosial mempengaruhi *slack*. Pengaruh partisipasi dalam proses penyusunan anggaran terhadap *slack* akan tinggi apabila tekanan sosial rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan sosial berfungsi sebagai variabel pemoderasi antara partisipasi penyusunan anggaran dan *slack*.

Untuk menjawab tujuan penelitian kedua yaitu tekanan sosial manakah yang mampu memberikan tekanan sosial paling besar, menunjukkan bahwa hanya tekanan sosial dari DPRD yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan *slack* daerah. Dengan demikian, tekanan sosial dari DPRD secara statistik mampu menekan *dysfunctional behavior* aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya penelitian ini dilakukan melalui metode survei melalui kuisisioner yang dikirim via email. Selain itu, Peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung kepada responden, sehingga kemungkinan ada jawaban responden yang tidak sesuai dengan maksud pertanyaan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiman, S., dan Evans, J.H. 1983. Pre-Decision Information and Perspective Management Control System. *Journal of Accounting Research*. (Autum). 371-395.
- Blanchette, Danielle, Claude Pilote dan Jean Cadiex. 2002. Manager's Moral Evaluation of Budgetary Slack Creation. *Working Paper*.
- Bursh, Tor. 2002. Slack in Public Administration: Conceptual and Methodological Issues. *Managerial Auditing Journal*. 153-159.
- Camman, C. 1976. "Effects of the Use of Control System." *Accounting, Organization and Society*. 1: 301-313.
- Dunk, Alan S. 1993. "The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation between Budgetary Participation and Slack." *The Accounting Review*. 68. 400-410.
- Fani, Rida Bulan. 2011. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Job Relevant Information serta Implikasinya pada Senjangan Anggaran. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 4, No.1: 33-50

- Fozaard, Adrian. 2001. *The Basic Budgeting Problem*. The Overseas Development Institute, London.
- Govindarajan V. 1986. Impact of Participation in Budgeting Process on Managerial Attitudes and Performance: Universalistic and Contingency Perspective. *Decision Science*. 17. 496-516.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip. Edisi 3.
- Gujarati, Damodar N. 2013. *Basic Econometrics*. (5rd Edition) Mc.Graw-Hill.
- Indriantoro, Nur. 2000. An Empirical Study of Locus of Control and Cultural Dimensions as Moderating Variables of the Effect of Participative Budgeting on Job Performance and Job Satisfaction. *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Januari. 97-114.
- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4): p. 305-360.
- Jones, Rowan., dan Maurice Pendlebury. 2000. *Public Sector Accounting*. Fifth Edition. Prentice Hall.
- Lowe, E.A., dan R. W Shaw. 1968. "An Analysis of Managerial Biasing: Evidence from a Company's Budgeting Process." *The Journal of Management Studies*. Oktober. 304-315
- Lukha, K. 1988. "Budgetary Biasing in Organizations: Theoretical Framework and Empirical Evidence." *Accounting, Organization and Society*. 13. 281-301.
- Mardiasmo. 2001. "Budgetary Slack Resulted from the Effect of Local Government Financial Dependency on Central and Provincial Government in Planning and Preparation Local government Budget. The Case of Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, Ekonomi*. 1. 55-74
- _____. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mas'ood, Mohtar. 2003. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Merchant, K.A. 1985. "Budgeting and the Propensity to Create Budgetary Slack." *Accounting, Organization and Society*. 10. 201-210.
- Milani, K. 1975. "The Relationship of Participation in budget-setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study." *The Accounting Review*. April. 274-284.
- Nouri, Hossein dan Robert J. Parker. 1996. "The Effect of Organizational Commitment on the Relation Between Budgetary Participation and Budgetary Slack." *Behavioral Research in Accounting*. 8. 74-90.
- Nunnally, J.C. 1978. *Psychometric Theory*. New York. Mc. Graw-Hill.
- Onsi, M. 1973. "Factor analysis of Behavioral Variables Affecting Budgetary Slack." *The Accounting Review*. Juli. 535-548.
- Otley. M. 1985. The Accuracy of Budgetary Estimates: Some Statistical Evidence. *Journal of Business Finance & Accounting*. 415-428.
- Patuhuru, Wilter. 2005. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Pemoderat (Studi pada Pemerintah Kota Ambon). *Tesis S2*. Pascasarjana UGM.

- Rahmiati, Elfiyanti. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi dan Komitmen Organisasi sebagai Moderasi. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang. *Tidak dipublikasikan*.
- Robert, Anthony dan John Dearden. 1980. *Management Control System*. Illinois. Richard D. Irwin Inc.
- Sandrya, Ni luh Putu Dewi dan Wirawan, Gerianta Yas. 2013. Analisis Pengaruh Anggaran Partisipatif pada Budgetary Slack dengan Empat Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi Udayana.
- Stede, Win A. Van Der. 2000. The Relationship Between Two Consequences of Budgetary Controls: Budgetary Slack Creation and Managerial Short-Term Orientation. *Accounting, Organizations, dan Society*. 609-622.
- Suhartono, Erhman. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *SNA 9 Padang*.
- Young, S.M. 1985. "Participative Budgeting: The Effects of Risk Aversion and Asymmetric Information on Budgetary Slack." *Journal of Accounting Research*. Autumn. 829-842.
- Yuhertiana, Indrawati. 2004. Kapasitas Individu dalam Dimensi Budaya, Keberadaan Tekanan Sosial dan Keterkaitannya dengan Senjangan Anggaran (Kajian Perilaku Eksekutif dalam Proses Perencanaan Anggaran di Jawa Timur). *Disertasi S3*. Tidak dipublikasikan. FE-Universitas Brawijaya.

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP SLACK DENGAN TEKANAN SOSIAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	topemailsender.com Internet Source	2%
2	ejournal.narotama.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
4	feb.unila.ac.id Internet Source	1%
5	books.google.co.id Internet Source	1%
6	journals.ums.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.stiesia.ac.id Internet Source	1%
8	repository.umrah.ac.id Internet Source	1%
9	ojs.polinpdg.ac.id Internet Source	1%
10	repository.unika.ac.id Internet Source	1%
11	Text-Id.123dok.Com Internet Source	1%
12	etd.uum.edu.my Internet Source	1%

13	Submitted to UPN Veteran Jawa Timur Student Paper	1 %
14	repository.wima.ac.id Internet Source	1 %
15	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
17	rajobaso.com Internet Source	1 %
18	sichesse.blogspot.com Internet Source	1 %
19	e1lmiah.wordpress.com Internet Source	1 %
20	www.neliti.com Internet Source	1 %
21	id.123dok.com Internet Source	1 %
22	trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	1 %
23	adoc.pub Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On